

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan proses tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian Pustaka juga mendukung proses pencarian teori

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.:

1. Hasil Penelitian Siti Widharetno Mursalim (2017)

Penelitian ini berjudul "*Implementasi Kebijakan Smart city Di Kota Bandung*". Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang *Smart city Award 2015* yang diadakan oleh majalah Asia's Tech Ecosystem. Mengingat bahwa konsep *Smart city* ini masih terus berkembang

dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*), menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, dan menggunakan teori dari G. Edward III mengenai Implementasi Kebijakan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai *Smart city* yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai *Smart city* dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan referensi mengenai keadaan dan situasi pelaksanaan *Smart city* di Kota Bandung yang dimana ditemukan fakta bahwa tingkat sosialisasi dan infrastrukturnya belum memadai standar *smart city* dan juga didukung dengan kurangnya pemahaman aparatur mengenai konsep *smart city* yang dimana dalam penelitian yang dibuat penulis akan membahas mengenai salah satu fasilitas atau infrastruktur yang didalamnya terdapat aparatur yang bertugas, dari hasil penelitian penulis akan diketahui apakah fasilitas Bandung *Command Center* ini sudah berjalan sesuai konsep *Smart city* atau belum.

2. Hasil Penelitian Nia Septiani Edam, Sofia Pangemanan, dan Josef Kairupan (2018)

Penelitian ini berjudul “*Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik, Studi Di Kantor Walikota Manado*”. Untuk mengukur tingkat efektivitas pada proses pelayanan kepada masyarakat penelitian ini menggunakan teori dari Sondang P. Siagian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan-penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan.

Dalam proses pelaksanaan program ini ada kendala yang ditemui oleh pemerintah yaitu, koordinasi antar dinas masih lambat karena belum semua dinas bekerja sama dengan cerdas *Command Center* inipun diakui oleh pihak pemerintah kota karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan berhubung juga Cerdas *Command Center* ini baru 1,5 tahun beroperasi di Kota Manado. Kemudian dari segi fasilitas juga belum lengkap, dan masih diusahakan oleh pemerintah dalam pengadaan fasilitas. Dan juga sumber daya manusia yang masih kurang dalam mengoperasikan atau menjalankan program ini dan pemerintah kota pun mengontrak beberapa teknisi yang profesional di bidang informatika.

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil referensi pelaksanaan *Command Center* yang dilaksanakan di kota Manado yang dimana hal ini dapat menjadi komparasi pelaksanaan *Command Center* di Kota Bandung dengan melihat kelebihan dan

kekurangan masing masing dalam hal pelaksanaan contohnya dalam koordinasi antar lembaga yang dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dari *Command Center*.

3. Hasil Penelitian Irmawati Sobandi (2018)

Penelitian ini berjudul “*Peran Bandung Command Center (BCC) Dalam Mengembangkan Smart Government Di Kota Bandung*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.

Temuan dalam penelitian ini yaitu (1) *Bandung Command Center (BCC)* memiliki tiga penerapan konsep yaitu *control*, *observ*, serta *connect* dengan dua jenis layanan yaitu layanan untuk masyarakat dan layanan untuk pimpinan; (2) Implementasi *Bandung Command Center (BCC)* sudah berjalan sesuai dengan tujuannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (3) Perkembangan *smart government* di Kota Bandung terlihat dari adanya peningkatan kualitas pelayanan publik serta prestasi yang diraih Kota Bandung sebagai *Best Smart city* dan *Best Government* dalam ajang *Indonesia's Best Smart city and Best Gov Award 2016*; (4) Kendala dalam pengembangan *smart government* di Kota Bandung adalah kurangnya sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi; (5) Upaya dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya adalah mengoptimalkan

anggaran, menggunakan tenaga ahli dari luar pemerintahan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari penelitian ini penulis dapat memahami sejauh mana peran dari Bandung *Command Center* dalam pengembangan *Smart city* di Kota Bandung yang dimana penulis akan berfokus pada pelaksanaannya saja yang nantinya akan sedikit mengulas proses perencanaan dan evaluasi dari kebijakan *Command Center* ini yang tentunya dari penelitian ini penulis dapat meninjau dan membandingkan secara langsung seperti apa output dari penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan & Perbedaan				Lokus
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis	
1.	Siti Widhar etno Mursali (2017)	Implementasi Kebijakan <i>Smart city</i> Di Kota Bandung	Edward III Sedangkan penulis menggunakan Van Meter dan Van Horn	Kualitatif, Sedangkan penulis juga menggunakan kualitatif	Deskriptif, penulis menggunakan Deskriptif Analitik	Miles dan Huberman, penulis juga menggunakan teori dari Miles dan Huberman	Kota Bandung
2.	Nia Septiani Edam, Sofia Pangermanan,	Efektivitas Program Cerdas <i>Command Center</i> Sebagai	S.P Siagian Sedangkan penulis menggunakan Van	Kualitatif, Sedangkan penulis juga menggunakan kualitatif	Deskriptif Analitik, penulis juga menggunakan	Miles dan Huberman, penulis juga	Kota Manado

	dan Josef Kairupan (2018)	Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik, Studi Di Kantor Walikota Manado	Meter dan Van Horn		akan Deskriptif Analitik	menggunakan teori dari Miles dan Huberman	
3.	Irmawati Sobandi (2018)	Peran Bandung <i>Command Center</i> (BCC) Dalam Mengembangkan Smart Government Di Kota Bandung	Zeithaml, Parassuraman & Berry Sedangkan penulis menggunakan Van Meter dan Van Horn	Kualitatif, Sedangkan penulis juga menggunakan kualitatif	Deskriptif, penulis menggunakan Deskriptif Analitik	Miles dan Huberman, penulis menggunakan teori dari Miles dan Huberman	Kota Bandung

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu memberikan wawasan dan pendalaman terhadap peneliti. Disamping itu ada perbedaan yang cukup mendasar antara teori yang digunakan peneliti terdahulu dengan usulan penelitian yang dibuat oleh peneliti, termasuk objek yang akan diteliti pun sangat berbeda. Oleh karena itu usulan penelitian yang peneliti buat masih bersifat orisinal sehingga tidak plagiat.

2.1.2 Konsep Administrasi Publik

Pengertian Administrasi menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Ulbert (2009:9) mengatakan: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan Menurut Siagian (2013: 2) administrasi adalah: “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan” Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian Yang dikutip oleh Beddy Iriawan Maksudi dalam bukunya Dasar-Dasar Administrasi Publik (2017:28) mendefinisikan administrasi sebagai berikut:

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya. dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. (Maksudi, 2017)

Definisi di atas menyatakan bahwa administrasi terdiri dari berbagai aspek, antara lain adanya proses pengambilan keputusan, adanya dua orang atau lebih, dan adanya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya

guna dan berhasil guna. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut; Pengorganisasian, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, perwakilan dan management.

Akan halnya manajemen, banyak pendapat yang mengatakan bahwa manajemen adalah bagian dari administrasi seperti di atas, dan ada pula sebaliknya. Sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau negara mana pendapat itu berasal (Prajudi 1982, 32). Pada kesempatan lain para ahli administrasi pada umumnya sependapat bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi, dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen (Siagian 1985, 7). Kendati manajemen tersebut memiliki fungsi-fungsi sebagai; Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (George R. Terry)

Istilah Administrasi Publik dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni Administrasi dan Publik. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrate* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (intensif) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Sedangkan Publik secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja. Apabila *public administration* diterjemahkan sebagai administrasi negara, maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintahan akan bermotivasi serba negara. Negara dianggap mewakili Tuhan di dunia, apabila persoalan sudah mengatasnamakan negara, sulit untuk dibantah.

Arti dari Publik itu sendiri menurut Inu Kencana Syafie (1999) Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Administrasi Publik mengurus kepentingan masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyat tersebut diatas. Dalam pelayanan tersebut sebagai birokrasi pemerintahan menerapkan berbagai disiplin. Di sinilah mulanya intervensi publik (publik dalam hal ini dikatakan pemerintah) sehingga publik diartikan sebagai social convention (pertemuan yang memerintah dengan diperintah) dan master place situations (penempatan pada proporsinya)

Menurut Nigro dan Nigro Pengertian administrasi publik adalah bentuk usaha kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang kemudian mencakup dalam tiga, yakni lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif yang dilakukan kerjasama dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Leonard D. White Dalam artiannya, ia sendiri mengartikan bahwa administrasi publik adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara yang telah disepakati bersama-sama, kesempatan ini dilakukan antara lembaga negara.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang ikhlas dan sukarela yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara guna mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien

Sebagaimana kita ketahui pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya (menurut Ponsioen), yaitu dalam menentukan kebijaksanaan tersebut. Proses penetapan kebijaksanaan umum itu disebut pemerintahan (menurut Apter) dan proses pelaksanaannya yang juga disebut business side pemerintahan dinamakan administrasi publik (menurut Waldo) atau dapat juga disebut sebagai administrasi pemerintahan.

Dengan demikian terlihat bahwa penetapan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang dijalankan pemerintah, dan pelaksanaannya adalah fungsi administrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh F.J. Goodnow dalam bukunya *Politics and Administration*, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan atau melahirkan keinginan negara (the formulation of the will of the stated), sementara administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan kehendak negara (the execution of the will of the stated).

Dari pendapat ini tampak bahwa dalam perimbangan administrasi dan politik diperlukan penegakkan hukum tata negara. Lebih lanjut administrasi publik dalam penyelenggaraan kerjasama untuk mencapai tujuan negara membentuk departemen-departemen dan lembaga nondepartemen sesuai peraturan dalam hukum tata negara yang diciptakan. Hal ini sesuai dengan pengertian Administrasi Publik menurut John M. Pfiffner dan Robert Presthus yang mengungkapkan bahwa Administrasi

Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik

Dalam ilmu administrasi negara tentu saja sering adanya permasalahan-permasalahan publik yang membutuhkan penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan publik tersebut perlu adanya penguasaan kajian kebijakan publik bagi birokrat dan analisis kebijakan publik. Dengan adanya kebijakan publik maka para birokrat akan dapat mengetahui isu-isu tersebut sudah termasuk ke dalam isu publik ataukah belum, apakah permasalahan tersebut menjadi permasalahan publik atau tidak. Selain itu dengan adanya kebijakan publik para birokrat juga akan mengetahui apakah kebijakan publik sudah responsif terhadap masalah/kebutuhan/aspirasi masyarakat.

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Thomas R Dye dalam Leo Agustino (2014:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sedangkan kebijakan publik menurut Woll

sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

“Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut” (Wibawa, 2011: 15).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara

kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan

kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan (Sofyan Effendi).

Dari pengertian tersebut penulis dapat menginterpretasikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang kompleks, subjek, dan objek yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-motif majemuk. Hal ini menurut (Mustopadidjaja, 2003:2) bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata mata kegiatan teknis tehnokratis tetapi juga kegiatan sosiologis yang dinamis, dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks.

Menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga agenda setting menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda Setting adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Di Dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui kearah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Dalam penentuan kebijakan public sangatlah dipengaruhi oleh factor lingkungan.

2) Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Selama tahap dari siklus kebijakan, dinyatakan masalah, proposal, dan tuntutan berubah ke dalam program pemerintah. Formulasi kebijakan dan adopsi mencakup definisi tujuan apa yang harus dicapai dengan kebijakan dan pertimbangan alternatif tindakan yang berbeda. Beberapa penulis membedakan antara perumusan (alternatif untuk tindakan) dan adopsi akhir (keputusan formal untuk mengambil kebijakan). Karena kebaikan tidak akan selalu diformalkan ke program terpisah dan pemisahan yang jelas antara formulasi dan pengambilan keputusan sangat sering mungkin terjadi, kita memperlakukan mereka sebagai sub tahapan satu panggung dari siklus kebijakan.

3) Pembuatan Kebijakan (*decision making*),

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Dari kelima proses tersebut tentunya diperlukan pertimbangan dan informasi yang cukup dan diperlukan juga orang-orang yang kompeten di dalam mengkaji permasalahan yang terjadi, pemerintah bisa bekerjasama

dengan berbagai pihak dalam proses perencanaan kebijakan agar segala informasi literatur dan kajian yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan dapat membuat kebijakan yang tepat.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya (dalam Mustari, 2013:31).

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari adanya sebuah kebijakan tertentu. Pada tahap ini, perlu adanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hasil dari implementasi kebijakan yang baik akan menghasilkan sebuah sistem tata kelola fasilitas Bandung *Command Center* yang sesuai dengan harapan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2.1.4 Kajian Implementasi Kebijakan

2.1.4.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018)

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi”

Pengertian yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dan pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari kalangan pemerintahan formal dan swasta dengan tujuan untuk

mencapai target yang telah disepakati bersama dalam tahap perencanaan dan pembuatan kebijakan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Donald van Meter, and Carl E van Horn (1975), "The Policy Implementation process; seperti dikutip Budi Winarno; 2007:144).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada adalah: "(1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups" (Abdullah, 1988:11; Smith, 1977:261)

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-

up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "policy delivery system?". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian / penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah

abstraksi atau performansi suatu pengejawanan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Kemudian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal

(utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthick (dalam Van Metter dan Van Horn, 1974) bahwa: *“New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*.

Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

“Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya menjadi acuan yang penting dalam proses implementasi kebijakan baik dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang hal itu tentunya harus menjadi perhatian oleh instansi pelaksana kebijakan, dari ketia

faktor tersebut harus seimbang karena memiliki sifat saling mempengaruhi dan menjadi patokan keberhasilan kebijakan.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

a) Standard Operating Procedures (SOP).

Standar Operasional Prosedur SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Standar Operasional Prosedur

SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Standar Operasional Prosedur SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas Standar Operasional Prosedur SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

b) Fragmentasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006) mengenai sikap para pelaksana kebijakan adalah:

“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat

mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi dengan adanya pandangan terhadap suatu kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap suatu kepentingan-kepentingan dalam organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terhadap tiga macam elemen respon dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, instansi terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para

pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).

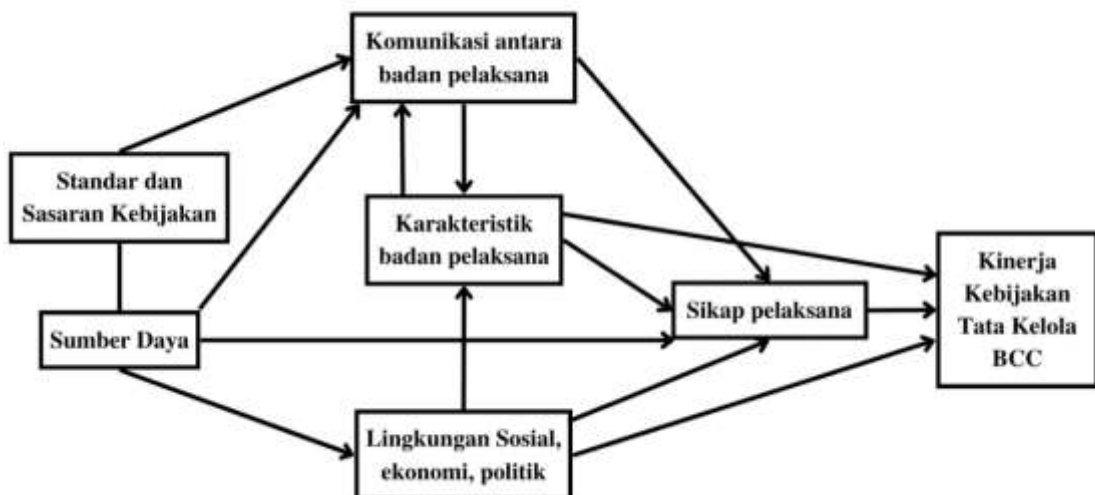
Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Metter dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti tertarik menggunakan model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan (Agustino, 2006). Keduanya menegaskan pendirian bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Model a Policy Implementation Process

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi. Kata kunci yang digunakan yakni perubahan, control, dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan tata kelola Bandung *Command Center* sangat berkaitan dengan dunia teknologi yang dimana teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga menyebabkan pemerintah harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, sehingga faktor perubahan dalam penelitian kali ini menurut peneliti menjadi sangat penting.

2.1.4.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

1) Pendekatan Top Down.

Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun di kemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari actor tingkat

pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

2) Pendekatan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses

kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dalam penulisan penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan **top down** karena peneliti akan lebih terfokus dalam hal mengkaji pelaksanaan kebijakan tata kelola *Command Center* Kota Bandung yang dimana kebijakan ini dibuat oleh pimpinan Kota Bandung sendiri yaitu Walikota Yana Mulyana yang tercantum dalam Perwal No 20 Tahun 2022.

2.1.5 Konsep *Smart city*

Sutriadi dalam bukunya yang berjudul *10 Langkah Mencerdaskan Kota* (2017:35) menjelaskan bahwa *Smart city* merupakan suatu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menata masa depan lebih baik dengan cara mengembangkan suatu kebijakan dan target pembangunan yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. *Smart city* atau bisa didefinisikan sebagai kota cerdas, kata cerdas yang dimaksud yaitu cerdas dari sistem manajemennya, cerdas warganya, dan cerdas pemerintah kotanya. Tujuan utama dari *Smart city* ini tentunya untuk menjadikan pelayanan publik lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akurat.

Konsep *Smart city* mempunyai beberapa elemen di dalamnya menurut Cohen dalam Sutriadi 10 Langkah Mencerdaskan Kota (2017:54) ada 6 elemen yaitu Smart Economy (ekonomi yang pintar) yang meliputi faktor seperti inovasi, kewirausahaan, self-branding, produktivitas, dan juga persaingan dalam pasar internasional. Kemudian ada juga Smart People (masyarakat yang pintar) yang tidak hanya terkait dengan level pendidikan dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi didalamnya. Smart Governance (pemerintahan yang pintar) meliputi faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan administrasi publik. Aksesibilitas lokal maupun internasional merupakan faktor-faktor dari Smart Mobility (pergerakan yang pintar) selain dari ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Smart Environment (lingkungan yang pintar) yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami dan Smart Living (pola hidup yang pintar) yang berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota juga merupakan dua elemen yang tidak kalah penting. Elemen elemen ini tidak harus semuanya dikembangkan namun dapat difokuskan pada satu atau sebagian saja tergantung dengan potensi dan karakter kota tersebut.

Terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur *Smart city* Sebagaimana dinyatakan oleh Cohen (2015):

- 1) *Smart Economy* selalu semangat dalam berinovasi, kewirausahaan, berusaha selalu produktif dan juga persaingan dalam pasar

internasional, Karena sesuatu persaingan yang bersifat mutlak yang senantiasa bergerak secara dinamis.

- 2) *Smart People* terkait dengan level pendidikan dari masyarakat, juga interaksi sosial yang terjadi didalamnya yang merupakan segi sosial dan kemanusiaan. Selain itu yang menjadi salah satu indikator kuat dari masyarakat cerdas adalah fleksibilitas.
- 3) *Smart Government* Pemerintah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu hal penting adalah birokrasi transparan dan terbuka secara efektif dan efisien yang meliputi berbagai faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan partisipasi publik juga aksesibilitas lokal maupun internasional.
- 4) *Smart Mobility* ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan akses untuk penduduk di suatu kota menjadi prioritas. Tidak hanya untuk penduduk, namun juga memberi kemudahan bagi pendatang atau turis asing yang berkunjung ke kota tersebut dan juga serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.
- 5) *Smart Environment* berkaitan dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami dan bebas dari polusi udara maupun polusi lainnya serta mempunyai sumber daya alam yang berkesinambungan.
- 6) *Smart Living* berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota dengan berbagai fasilitas kesehatan, fasilitas budaya, dan

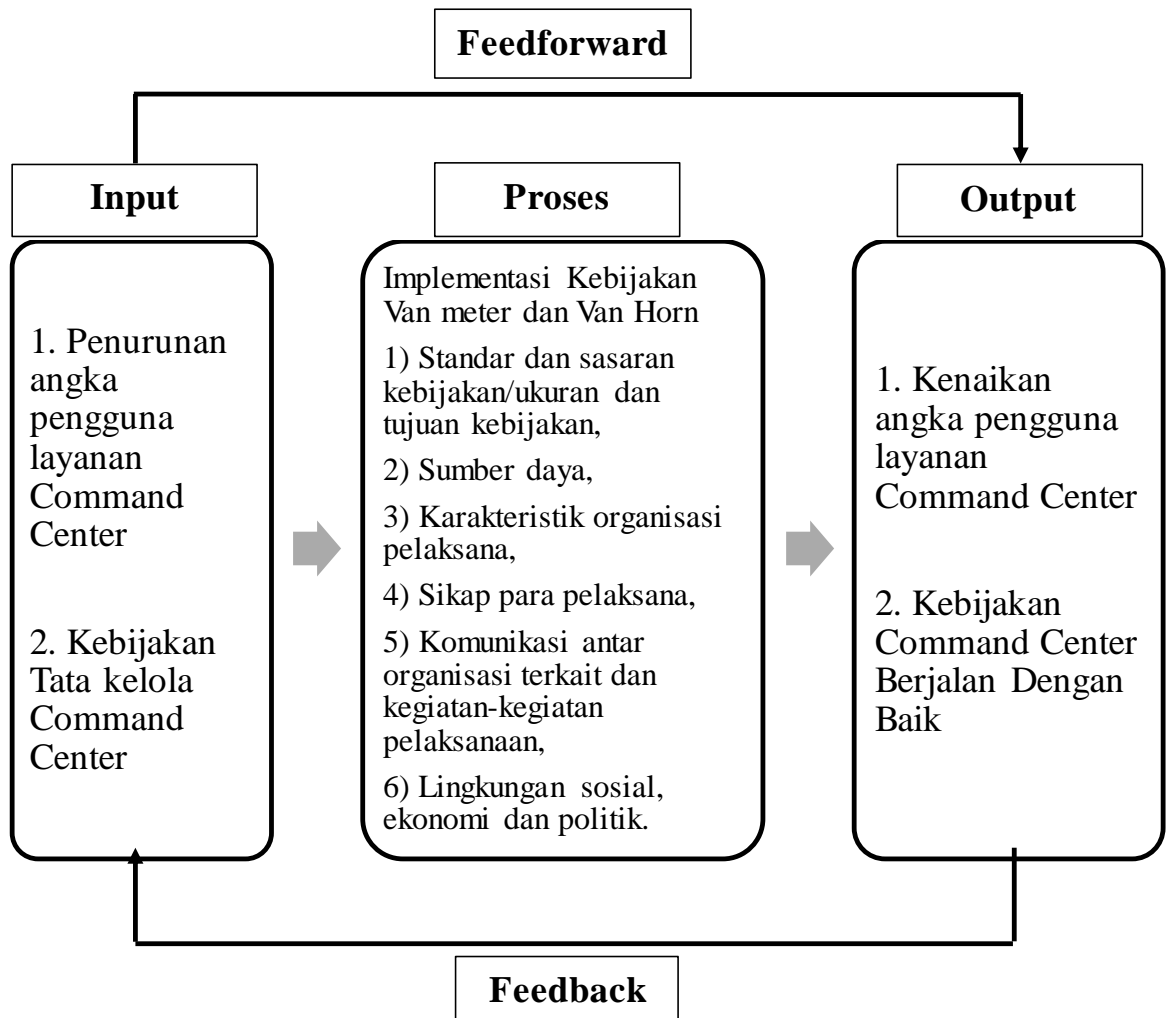
pendidikan yang lengkap dan memadai serta kehidupan sosial yang menyatu.

2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan kerangka penelitian yang membahas mengenai implementasi dari kebijakan tata kelola Bandung *Command Center*. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: Kebijakan tata kelola Bandung *Command Center* yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang tata kelola *Command Center*.

Permasalahan yang ada seringkali berawal dari masyarakat yang kurang memahami dalam mengoperasikan pelayanan yang ada di Bandung *Command Center* (BCC), misalnya dalam layanan NTPD 112 dimana sistem kerap kali mendapatkan telepon yang berasal masyarakat dimana masyarakat hanya penasaran atau sekedar melakukan keusilan untuk sekedar memastikan nomor NTPD 112 bisa terhubung secara langsung dengan sistem atau tidak. Layanan yang berbasis pada android yaitu Panic Button pun terkena kendala yang berhubungan dengan koneksi yang belum memadai dan lambat pada perangkat yang terhubung langsung dengan operator sistem sehingga mempengaruhi proses penanganan pelaporan pada situasi darurat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemukan di atas pemerintah kota Bandung sudah membuat solusi berupa menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang tata kelola *Command Center*. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari kebijakan tersebut perlu dilakukan analisis secara mendalam yang membahas mengenai faktor faktor esensial dalam proses implementasi kebijakan dari berbagai teori yang ada mengenai implementasi kebijakan penulis memilih teori dari Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kata kunci yang digunakan dalam analisis pelaksanaan kebijakan ini yaitu perubahan, control, dan kepatuhan, termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan tata kelola Bandung *Command Center* sangat berkaitan dengan dunia teknologi yang dimana teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga menyebabkan pemerintah harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, sehingga faktor perubahan yang terdapat di dimensi lingkungan sosial ekonomi dan politik dalam penelitian kali ini menurut peneliti menjadi sangat penting.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah.

- 1) Implementasi kebijakan tata kelola *Command Center* akan berjalan efektif apabila faktor Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik dapat terpenuhi
- 2) Terdapat adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tata kelola Bandung *Command Center*